2023

PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG





DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG 2023

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga terselesaikannya buku "**Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2023**" ini tepat pada waktunya.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dinas Pendidikan serta Bappeda terkait perencanaan Pendidikan di Kabupaten Tangerang ke depannya. Selain itu, buku profil ini juga dapat bermanfaat bagi para pembaca ataupun instansi-instansi terkait lainnya.

Di dalam buku ini ditampilkan antara lain terkait capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD Kabupaten Tangerang, jumlah satuan Pendidikan, jumlah siswa, jumlah guru, ketersediaan sarana dan prasarana dan entitas lainnya pada jenjang pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Nonformal (PAUD dan Dikmas).

Tangerang, Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
H.Dadan Gandana,S.STP.,M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 2

C. Isu-Isu Strategis 2

D. Demografi Kabupaten Tangerang 5

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN

A. Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi 7

B. Struktur Organisasi 7

C. Rencana Strategis Dinas Pendidikan 9

D. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Hasil Reviu 11

E. Pegawai Dinas Pendidikan 13

F. Program Dinas Pendidikan dan Capaian 14

BAB III DATA KEPENDIDIKAN

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni APM) 15

B. Data Pokok Pendidikan Formal 16

C. Data Pokok Pendidikan Nonformal 39

D. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan 44

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tangerang 5
Grafik 1.2 Persentase Penduduk 6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan 8
Grafik 3.1 Capaian APK dan APM Kabupaten Tangerang 16
Grafik 3.2 Sebaran SD Berdasarkan Status per Kecamatan 17
Grafik 3.3 Sebaran SMP Berdasarkan Status per Kecamatan 18
Grafik 3.4 Sekolah Berdasarkan Akreditasi 19
Grafik 3.5 Persentase Siswa Berdasarkan Status Sekolah 20
Grafik 3.6 Persentase Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin 21
Grafik 3.7 Persentase Guru berdasarkan Status Sekolah 23
Grafik 3.8 Persentase Guru berdasarkan Jenis Kelamin 24
Grafik 3.9 Persentase Guru SD berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi pendidikan 25
Grafik 3.10 Persentase Guru SMP berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi pendidikan 26
Grafik 3.11 Persentase Guru SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 27
Grafik 3.12 Persentase Guru SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 28
Grafik 3.13 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin 29
Grafik 3.14 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian 30
Grafik 3.15 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 31
Grafik 3.16 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 32
Grafik 3.17 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan jenis 34
Grafik 3.18 Persentase Sarana Prasarana SD menurut Kondisi 37
Grafik 3.19 Persentase Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi 38

Grafik 3.20 Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal 40
Grafik 3.21 Sebaran Data PAUD 41
Grafik 3.22 Sebaran Data PKBM 41
Grafik 3.23 Persentase Peserta Didik/ Wajib Belajar 42
Grafik 3.24 Persentase Pendidik Pendidikan Nonformal 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan 2
Tabel 1.2 Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Pendidikan 6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 11
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu 12
Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pendidikan 13
Tabel 2.4 Program Dinas Pendidikan Tahun 2023 14
Tabel 3.1 Jumlah Sekolah Berdasarkan Status 17
Tabel 3.2 Siswa Berdasarkan Jenjang Sekolah 20
Tabel 3.3 Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin 21
Tabel.3.4 Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) SD 22
Tabel.3.5 Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) SMP 22
Tabel 3.6 Jumlah Guru berdasarkan Status Sekolah 23
Tabel 3.7 Jumlah Guru berdasarkan Jenis Kelamin 24
Tabel 3.8 Jumlah Guru SD berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi pendidikan 25
Tabel 3.9 Jumlah Guru SMP berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi pendidikan 25
Tabel 3.10 Jumlah Guru SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 26
Tabel 3.11 Jumlah Guru SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 27
Tabel 3.12 Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin 28
Tabel 3.13 Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian 29
Tabel 3.14 Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 30
Tabel 3.15 Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 31
Tabel 3.16 Pengawas Sekolah jenjang SD dan SMP 33
Tabel.3.17 Tenaga Penunjang Kependidikan SD 33
Tabel.3.18 Tenaga Penunjang Kependidikan SMP 33
Tabel 3.19 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan jenis 34
Tabel 3.20 Kepemilikan Toilet SD 35
Tabel 3.21 Kepemilikan Toilet SMP 35
Tabel 3.22 Ketersediaan Sarana Prasarana SD dan SMP 36

Tabel 3.23 Jumlah Sarana Prasarana SD menurut Kondisi 37
Tabel 3.24 Jumlah Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi 38
Tabel 3.25 Lembaga Pendidikan Nonformal 40
Tabel 3.26 Data Peserta Didik/ Warga Belajar 42
Tabel 3.27 Pendidik Pendidikan Nonformal 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki arah kebijakan merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera. Misi yang diamanatkan adalah Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat menuju Masyarakat yang Religius; dan Meningkatkan Akses Mutu dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Sehat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Buku Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang disusun dalam upaya menjadi acuan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pada buku ini menyajikan tentang entitas data yang mendukung terwujudnya program pembangunan pendidikan yaitu satuan pendidikan/ sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), peserta didik, dan substansi pendidikan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Harapan Dinas Pendidikan di masa yang akan datang yaitu mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah untuk memberikan gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang secara komprehensif dengan situasi dan isu yang berkembang sehingga menjadikan Dinas Pendidikan sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkontribusi dalam mencapai target kinerja sesuai visi misi Kabupaten Tangerang. Profil Dinas Pendidikan menjadi acuan program dan kegiatan di tahun mendatang sebagai bahan perencanaan untuk pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta perbaikan manajemen pendidikan.

C. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, target capaian kinerja Tahun 2023 dan isu strategis daerah, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan SMP)	Akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan SMP) belum merata	1. Rasio peserta didik terhadap ruang kelas belum ideal 2. Masih terdapat peserta didik yang putus sekolah 3. Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan
2	Belum Maksimalnya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum merata	1. Masih rendahnya peran orang tua terhadap pentingnya Pendidikan Paud bagi pengembangan potensi anak (golden age) 2. Masih kurangnya jumlah TK negeri 3. Terdapat Lembaga PAUD yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

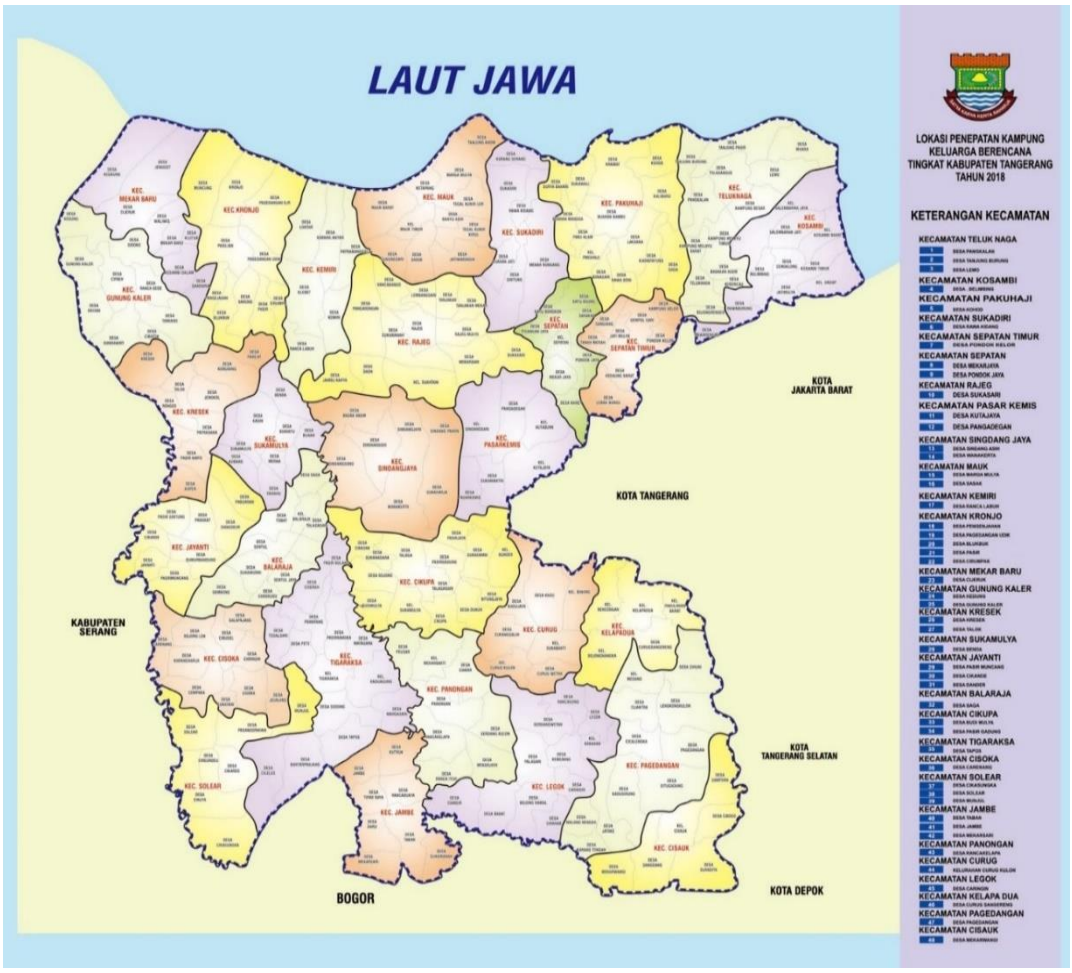
NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			4. Terdapat anak usia PAUD yang belum memperoleh layanan Pendidikan 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3	Belum Maksimalnya pelaksanaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Akses dan mutu layanan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan belum merata	1. Belum meratanya lembaga pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 2. Terdapat Lembaga Non Formal/ Kesetaraan yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 3. Masih terdapat ATS (Anak Tidak Sekolah) yang belum terlayani 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
4	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Masih rendahnya kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	1. Masih rendahnya standar kualifikasi/tingkat pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan 2. Pesebaran jumlah kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata pada Satuan Pendidikan 3. Belum optimalnya linearitas pendidikan/ program studi pendidik
		2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang administrasi sekolah	1. Kurangnya tenaga administrasi sekolah (TAS) 2. Rendahnya kualitas tenaga administrasi sekolah (TAS)

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		3. Kualitas pembelajaran belum maksimal	1. Belum maksimalnya pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik 2. Masih rendahnya Nilai Rapor Pendidikan 3. Belum maksimal pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka 4. Masih kurangnya sarana pendukung pembelajaran

D. Demografi Kabupaten Tangerang

a. Peta Wilayah

Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten yang berada di wilayah Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Ibu kota Kabupaten adalah Tigaraksa. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km^2 yang terdiri atas 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa. Wilayah Kabupaten Tangerang di wilayah utara berbatasan dengan Laut Jawa, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang dan wilayah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang.



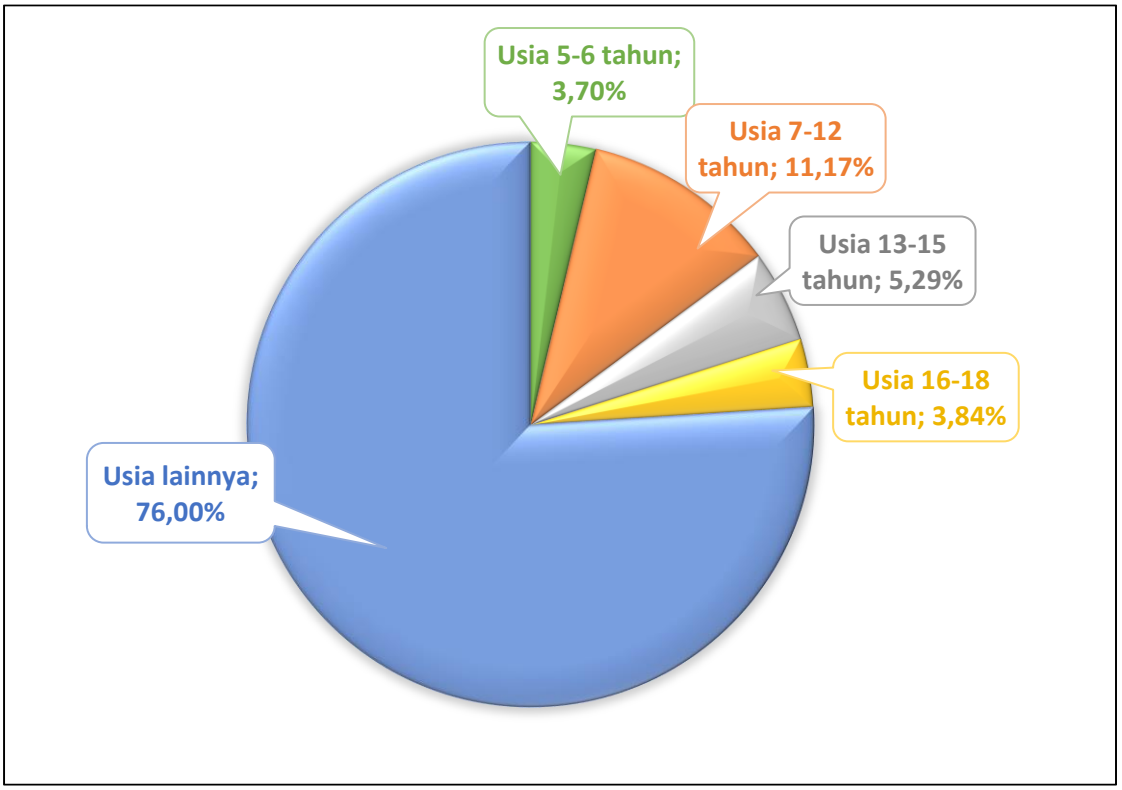
Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tangerang

b. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.273.321 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk usia sekolah 5 sampai 18 tahun 785.557 jiwa.

Tabel 1.2 Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Pendidikan

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun	121.016
2	Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun	365.552
3	Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun	173.320
4	Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun	125.669
5	Jumlah penduduk usia lainnya	2.487.764
Jumlah penduduk seluruhnya		3.273.321



Grafik 1.2 Persentase Penduduk

(sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang 2023 Semester 1)

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN

A. Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang Pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Pendidikan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

B. Struktur Organisasi

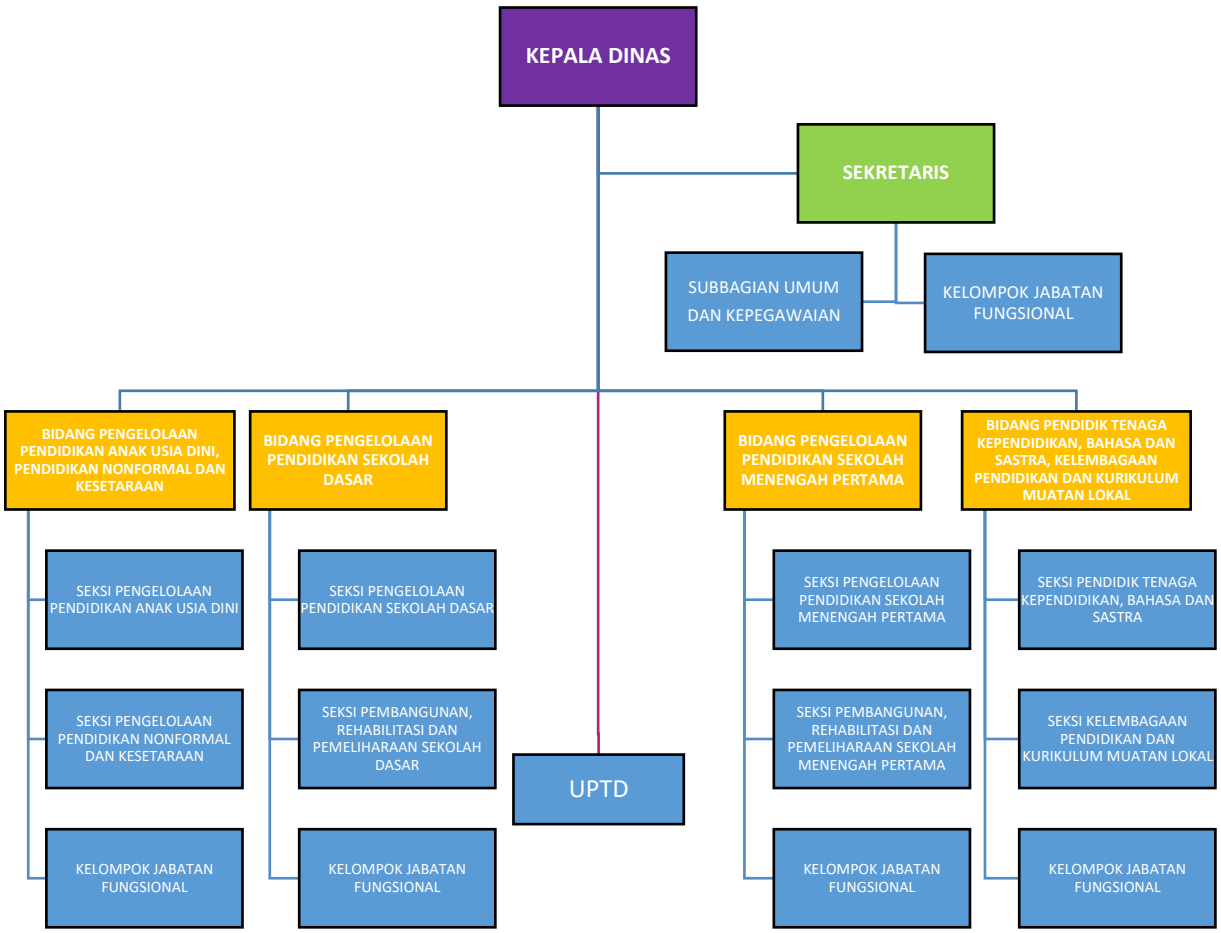
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terdiri dari:

A. Kepala
B. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional
C. Bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan
   1. Seksi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
   2. Seksi pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional
D. Bidang pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   1. Seksi pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
   2. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Menengah Pertama; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Bidang pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   1. Seksi pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
   2. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Menengah Pertama; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional

F. Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal
   1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa, dan Sastra;
   2. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional

G. UPTD



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

C. Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1) *Religius* mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.
2) *Cerdas* yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3) *Sehat* yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4) *Sejahtera* mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
2) Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3) Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
5) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
6) Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

b. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, yaitu:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya fungsi satuan pendidikan dalam peningkatan kualitas pengamalan nilai agama, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Didik Dalam Pengalaman Nilai-Nilai Agama	Jumlah Peserta Didik yang dapat Baca Tulis Al-Quran	0	5000	5000	5000	5000
2	Meningkatnya Akses dan layanan PAUD, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Dasar yang merata dan berkualitas	Meningkatnya Kualitasnya Layanan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan yang melaksanakan Program GSM	70	85	100	115	130
		Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	37,50	39,00	41,50	43,00	44,50
		Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	96,64	97,14	97,64	98,14	98,64
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	89,16	89,66	90,16	90,66	91,16
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat OPD	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	65	68	70	71	72

D. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Hasil Reviu

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pendidikan melakukan reviu terhadap perencanaan strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya fungsi satuan pendidikan dalam peningkatan kualitas pengamalan nilai agama, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Didik Dalam Pengamalan Nilai-Nilai Agama	Jumlah Peserta Didik yang dapat Baca Tulis Al-Quran	0	5000	10000	10000	10000
2	Meningkatnya Akses dan layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas		Prosentase Rata-rata pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	-	68,00	73,00	78,00	83,00
		Meningkatnya Akses dan kualitas layanan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan	Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dasar	-	66,52	71,00	76,00	81,00
			Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan PAUD	-	69,90	74,00	79,00	84,00
			Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan	-	68,00	73,00	78,00	83,00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	65,00	68,00	70,00	71,00	72,00

E. Pegawai Dinas Pendidikan

Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terdiri atas jabatan struktural dan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pegawai struktural terdiri dari ASN dan Non ASN. Pegawai struktural terdiri atas pegawai Eselon II, III, IV dan Non Eselon. Pegawai fungsional dalam hal ini adalah pengawas, penilik, widiaprada, PTP, dan perencanaan.

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal. Tugas pokok Penilik adalah melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, pendidikan kursus pada jalur Pendidikan Nonformal serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Tabel 2.3 Pegawai Dinas Pendidikan

Jabatan Eselon	ASN	Non ASN	Jumlah
a. Eselon II	1	0	1
b. Eselon III	5	0	5
c. Eselon IV	9	0	9
d. Non Eselon	33	57	90
e. Fungsional Pengawas	59	0	59
f. Fungsional Penilik	40	0	40
g. Fungsional Widiaprada	2	0	2
h. Fungsional PTP	2	0	2
i. Analis SDM	2	0	2
j. Fungsional Perencanaan	1	0	1
k. Analis Keuangan	1	0	1
Jumlah	**155**	**57**	**212**

F. Program Dinas Pendidikan dan Capaian

Program Dinas Pendidikan di Tahun 2023 terdiri atas 11 Program yang terdistribusi ke dalam 120 kegiatan pada 3 (tiga) bidang sesuai kewenangannya.

Tabel 2.4 Program Dinas Pendidikan Tahun 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Satuan	Target Indikator
1	2	3	4
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	94,5
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persen	79,30
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	48,60
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persen	0,11
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peserta Didik	10.000

BAB III
DATA KEPENDIDIKAN

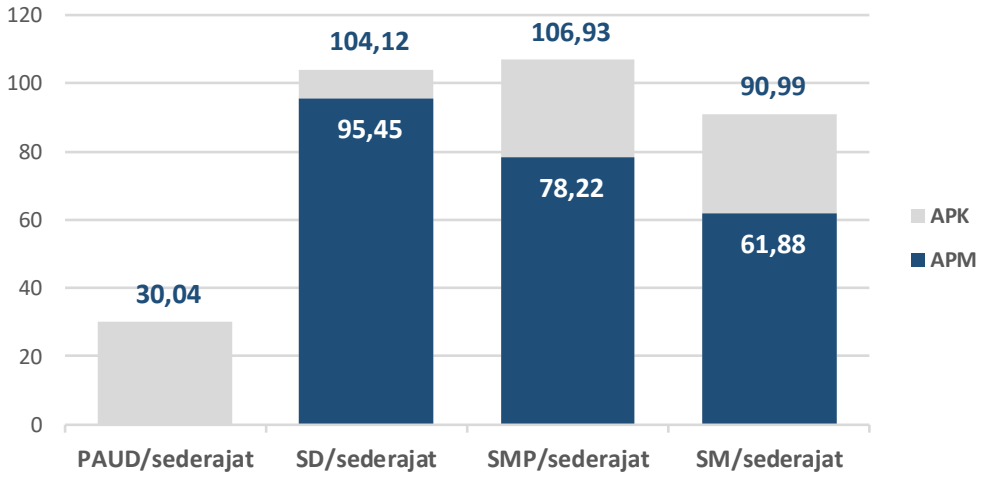
Profil Data Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2023 bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) baik untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal (PNF) kondisi bulan Oktober 2023. Selain Dapodik, sumber data yang digunakan adalah data internal Dinas seperti data pengawas dan penilik. Dalam profil ini juga ditampilkan capaian APK APM dari Kabupaten Tangerang Tahun 2023.

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni APM)

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk (khususnya usia sekolah) untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut usia sekolah yang berada disekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator, antara lain:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase
2. Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Berikut disajikan capaian APK dan APM Kabupaten Tangerang tahun 2022/2023 untuk seluruh jenjang pendidikan.



Grafik 3.1 Capaian APK dan APM Kabupaten Tangerang

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2022, Kemendikbudristek

Capaian APK tertinggi terdapat pada jenjang SMP/sederajat, sedangkan untuk APM terdapat pada jenjang SD/sederajat. Hal ini berarti, masih banyak siswa SMP yang usia nya tidak sesuai dengan jenjangnya (13-15 tahun). Kemudian, pada jenjang SM sederajat baik pada APK maupun APM belum mencapai 100% dengan capaian APM sebesar 61,88.

B. Data Pokok Pendidikan Formal

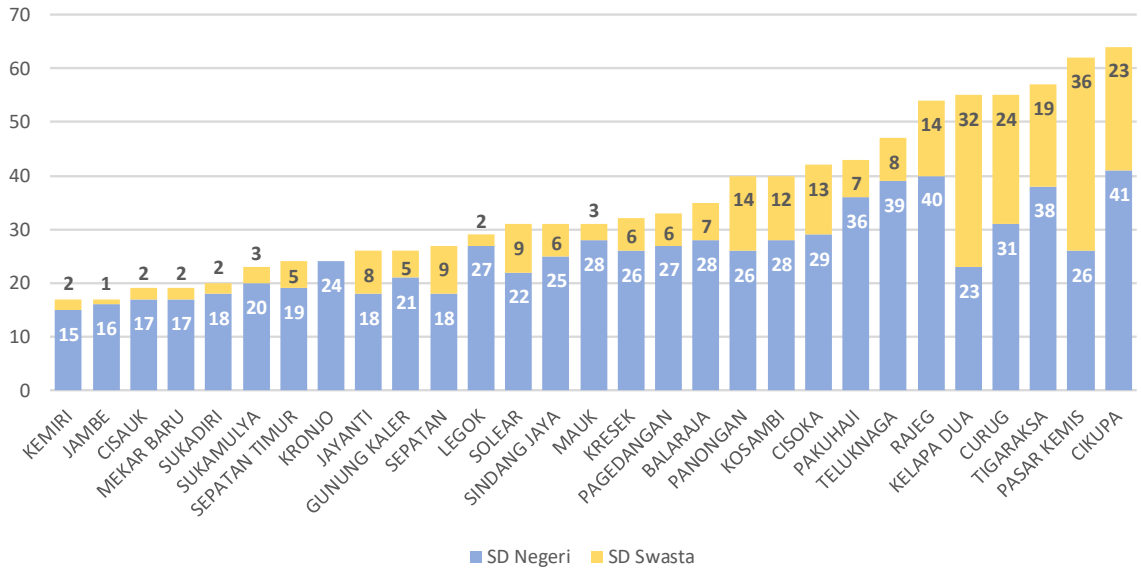
1. Data Sekolah

Pada Permendikbud Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada dinas daerah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Berarti dalam hal ini, kabupaten Tangerang menaungi jenjang pendidikan dasar yang berada di lingkup wilayah kabupaten Tangerang yaitu tingkat SD dan tingkat SMP. Berikut merupakan jumlah sekolah yang berada di wilayah kabupaten Tangerang.

Tabel 3.1 Jumlah Sekolah Berdasarkan Status

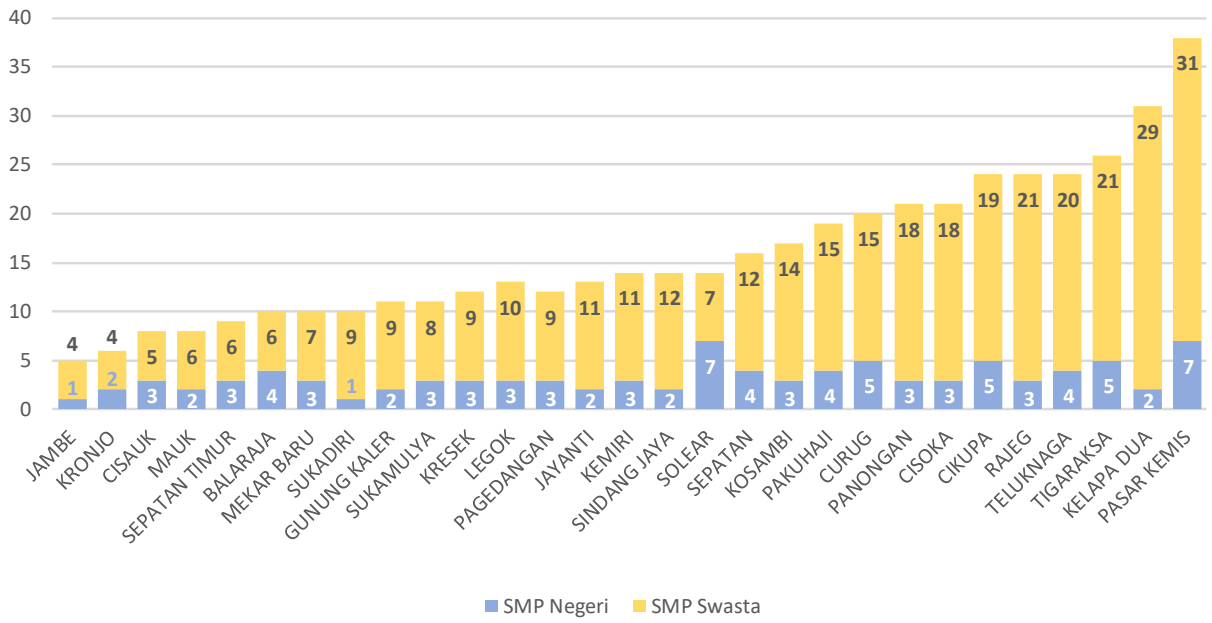
Status Sekolah	SD	SMP	Total
Negeri	743	95	838
Swasta	280	366	646
Total	**1.023**	**461**	**1.484**

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa total sekolah tingkat dasar pada kab. Tangerang berjumlah 1.481 sekolah yang terdiri atas 1.023 SD dan 458 SMP. Pada jenjang SD dapat terlihat jumlah sekolah negeri lebih banyak daripada sekolah swasta dengan jumlah sekolah negeri sebesar 743 sekolah dan swasta 280 sekolah. Sedangkan, pada jenjang SMP sekolah swasta lebih banyak dengan total 366 sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri yang hanya berjumlah 95 sekolah.



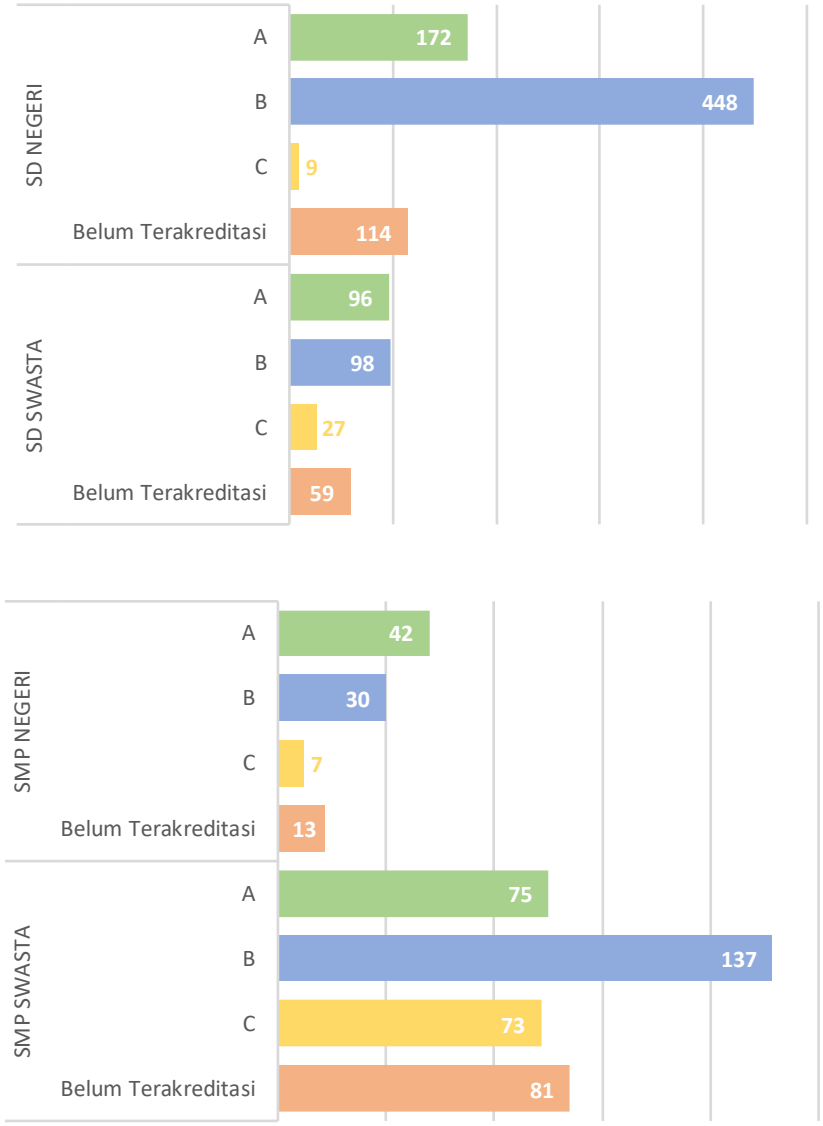
Grafik 3.2 Sebaran SD Berdasarkan Status per Kecamatan

Grafik di atas menunjukkan sebaran SD di Kabupaten Tangerang berdasarkan status sekolah per kecamatan. Dapat terlihat, jumlah SD terbanyak terdapat pada kecamatan Cikupa dengan 41 SD negeri dan 23 SD swasta. Sedangkan jumlah SD paling sedikit terdapat pada kecamatan Kemiri dengan 15 SD negeri dan 2 SD swasta. Hampir pada seluruh kecamatan, jumlah sekolah SD negeri selalu lebih besar dibandingkan sekolah SD swasta.



Grafik 3.3 Sebaran SMP Berdasarkan Status per Kecamatan

Pada tingkat SMP, sebaran sekolah paling banyak terdapat pada kecamatan Pasar Kemis dengan 7 SMP negeri dan 31 SMP swasta. Sedangkan jumlah sekolah paling sedikit terdapat pada kecamatan Jambe dengan 1 SMP negeri dan 4 SMP swasta. Berbeda dengan tingkat SD, pada tingkat SMP jumlah sekolah swasta hampir selalu lebih besar dibandingkan jumlah sekolah negeri.



Grafik 3.4 Sekolah Berdasarkan Akreditasi

Grafik di atas menunjukkan jumlah sekolah berdasarkan status sekolah dan akreditasi. Pada tingkat SD, kebanyakan sekolah memiliki akreditasi B baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Kemudian pada tingkat SMP, terdapat perbedaan pada sekolah negeri dan swasta. Pada sekolah swasta, kebanyakan memiliki akreditasi B, namun pada sekolah negeri lebih banyak yang memiliki akreditasi A.

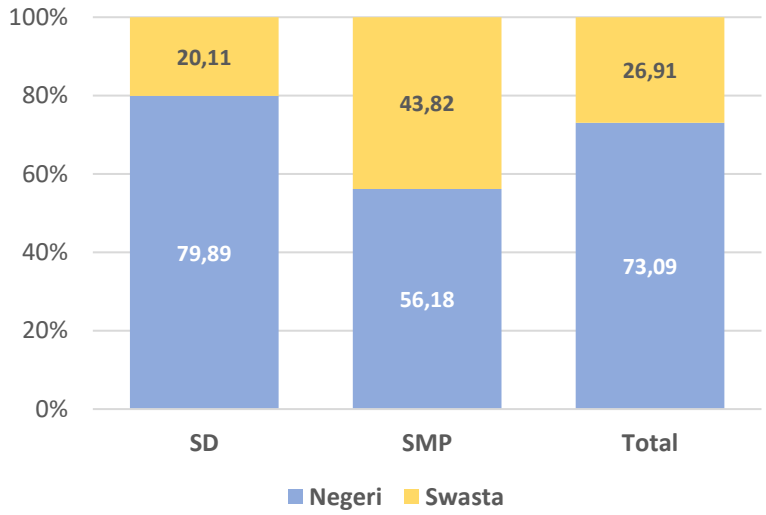
2. Data Sumber Daya Manusia

a. Siswa

Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan sumber data dari DAPODIK, jumlah siswa pada jenjang SD dan SMP pada sekolah negeri dan swasta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Siswa Berdasarkan Jenjang Sekolah

Status Sekolah	SD	SMP	Total
Negeri	265.238	75.057	340.295
Swasta	66.752	58.539	125.291
Total Siswa	**331.990**	**133.596**	**465.586**



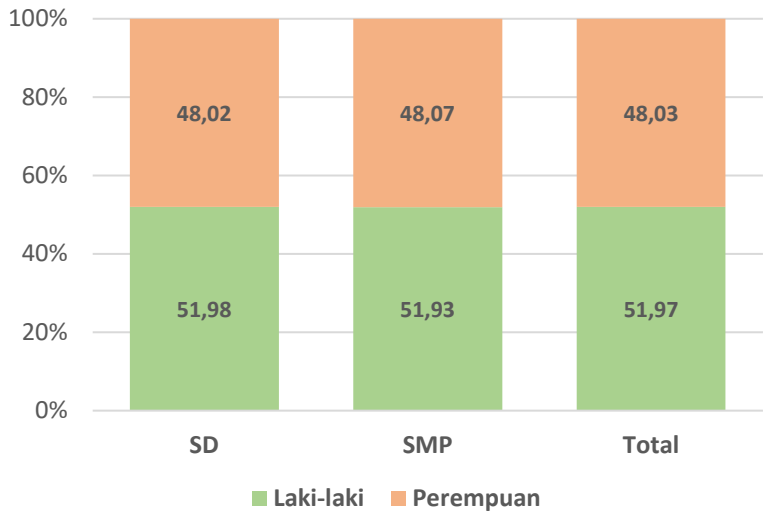
Grafik 3.5 Persentase Siswa Berdasarkan Status Sekolah

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Grafik 3.5 dapat diperoleh informasi bahwa jumlah siswa SD dan SMP di Kabupaten Tangerang yaitu berjumlah 465.586 siswa. Jumlah siswa SD yaitu 313.990 siswa dengan 265.238 (79,89%) merupakan siswa pada sekolah negeri dan 66.752 (20,11%) merupakan siswa pada sekolah swasta.

Kemudian jumlah siswa SMP yaitu berjumlah 133.596 siswa dengan 75.057 (56,18%) merupakan siswa pada sekolah negeri dan 58.539 (43,82%) siswa merupakan siswa pada sekolah swasta. Secara keseluruhan, jumlah siswa pada sekolah negeri yaitu 340.295 siswa atau 73,09% dan jumlah siswa pada sekolah swasta yaitu 125.291 siswa atau 26,91%.

Tabel 3.3 Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	SD	SMP	Total
Laki-laki	172.575	69.381	241.956
Perempuan	159.415	64.215	223.630
Total Siswa	**331.990**	**133.596**	**465.586**



Grafik 3.6 Persentase Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 3.3 dan Grafik 3.6 dapat diperoleh informasi jumlah siswa SD dan SMP di Kabupaten Tengerang berdasarkan jenis kelamin. Pada jenjang SD, jumlah siswa laki-laki yaitu 172.575 siswa (51,98%), sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa perempuan yaitu 159.415 siswa (48,02%). Kemudian pada jenjang SMP, jumlah siswa laki-laki yaitu 69.381 siswa (51,93%), juga sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa perempuan yaitu 64.215 siswa (48,07%).

Data siswa berdasarkan tingkatan kelas dan rombongan belajar (rombel) pada jenjang SD dan SMP disajikan pada Tabel berikut:

Tabel.3.4 Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) SD

Tingkat	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Rasio Siswa per Rombel
Tingkat 1	60.190	2.056	29
Tingkat 2	60.039	2.077	29
Tingkat 3	52.515	1.849	28
Tingkat 4	54.436	1.891	29
Tingkat 5	53.106	1.861	29
Tingkat 6	51.704	1.793	29
Total	**331.990**	**11.527**	**29**

Tabel 3.4 menampilkan jumlah siswa, jumlah rombongan belajar (rombel), dan rasio siswa per rombel pada jenjang SD. Jumlah siswa terbanyak terdapat pada Kelas 1 yaitu 60.190 siswa dan jumlah siswa terkecil terdapat pada Kelas 6 yaitu 51.704 siswa. Jumlah seluruh rombel SD yaitu sebanyak 11.527, sehingga secara umum rasio siswa per rombel adalah 29. Artinya, pada jenjang SD rata-rata jumlah siswa dalam 1 rombongan belajar adalah sebanyak 29 siswa.

Tabel.3.5 Siswa dan Rombongan Belajar (Rombel) SMP

Kelas	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Rasio Siswa per Rombel
Tingkat 1	45.805	1.382	33
Tingkat 2	45.436	1.389	33
Tingkat 3	42.355	1.315	32
Total	**133.596**	**4.086**	**33**

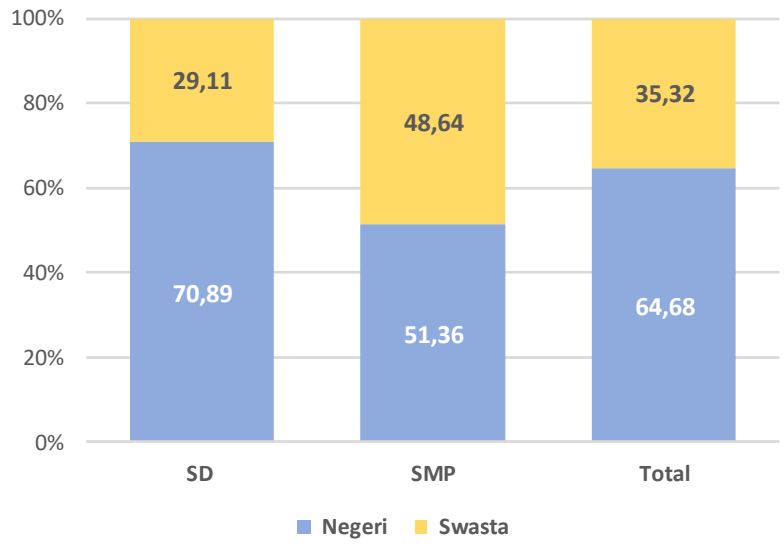
Tabel 3.5 menampilkan jumlah siswa, jumlah rombongan belajar (rombel), dan rasio siswa per rombel pada jenjang SMP. Jumlah siswa terbanyak terdapat pada Kelas 7 yaitu 45.805 siswa dan jumlah siswa terkecil terdapat pada Kelas 9 yaitu 42.355 siswa. Jumlah seluruh rombel SMP yaitu sebanyak4.086, sehingga secara umum rasio siswa per rombel adalah 33. Artinya, pada jenjang SMP rata-rata jumlah siswa dalam 1 rombongan belajar adalah sebanyak 33 siswa.

b. Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU No 14 Tahun 2005, pasal 8). Data guru jenjang yang berada di kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Jumlah Guru berdasarkan Status Sekolah

Status Sekolah	SD	SMP	Total
Negeri	8.857	2.989	11.846
Swasta	3.637	2.831	6.468
Total Guru	**12.494**	**5.820**	**18.314**



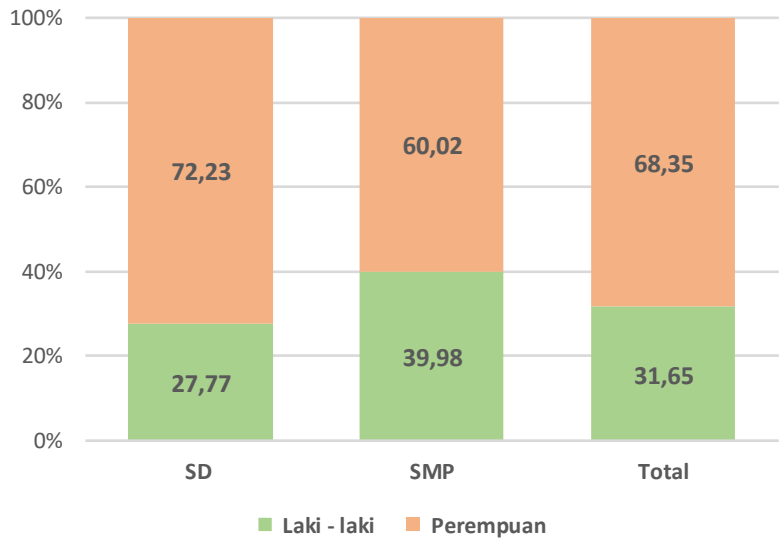
Grafik 3.7 Persentase Guru berdasarkan Status Sekolah

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat terlihat bahwa total guru jenjang pendidikan dasar pada kab. Tangerang berjumlah 18.314 guru yang terdiri atas 12.494 guru SD dan 5.820 guru SMP.

Pada jenjang SD dapat terlihat jumlah guru sekolah negeri lebih banyak daripada guru sekolah swasta dengan jumlah guru sekolah negeri sebesar 8.857 guru dan swasta 3.637 guru. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SMP namun dengan perbedaan yang tipis, jumah guru sekolah negeri sedikit lebih banyak yaitu 2.989 guru dibandingkan jumlah guru sekolah swasta yang hanya berjumlah 2.831 guru.

Tabel 3.7 Jumlah Guru berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	SD	SMP	Total
Laki - laki	3.469	2.327	5.796
Perempuan	9.025	3.493	12.518
Total Guru	**12.494**	**5.820**	**18.314**

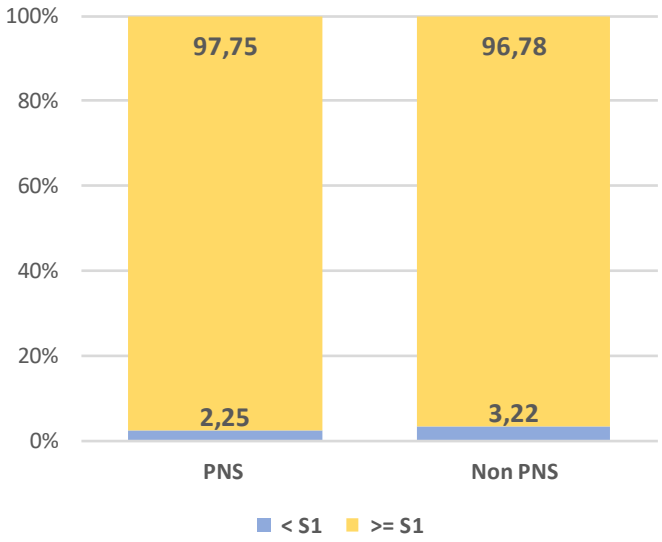


Grafik 3.8 Persentase Guru berdasarkan Jenis Kelamin

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik pada tingkat SD maupun SMP jumlah guru perempuan selalu lebih banyak dibandingkan dengan guru laki-laki. Pada tingkat SD, persentase guru perempuan 72,23% dibandingkan dengan total guru. Begitu pula pada tingkat SMP, namun dengan persentase yang sedikit lebih kecil yaitu persentase guru perempuan sebesar 60,02% dibandingkan dengan total guru.

Tabel 3.8 Jumlah Guru SD berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Status Kepegawaian		Total
	PNS	Non PNS	
< S1	68	305	373
>= S1	2.951	9.170	12.121
Total Guru	**3.019**	**9.475**	**12.494**

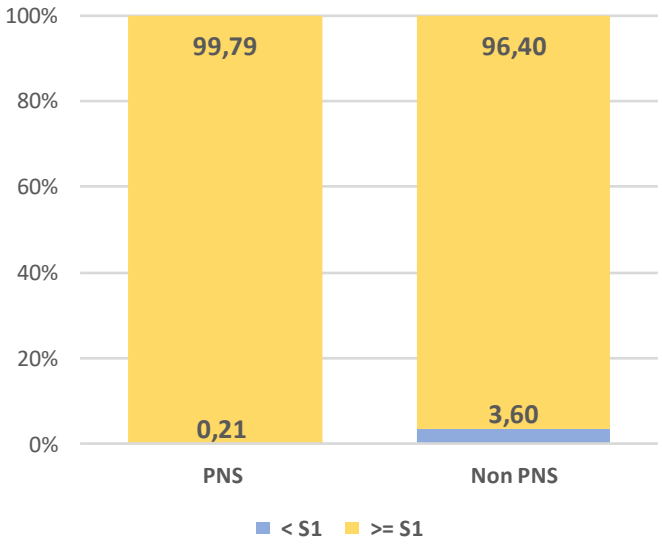


Grafik 3.9 Persentase Guru SD berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi pendidikan

Berdasarkan status kepegawaian, pada tingkat SD jumlah guru PNS masih lebih kecil jumlahnya dibandingkan guru non PNS. Kemudian jika melihat kualifikasi pendidikan, secara keseluruhan hampir seluruh guru sudah memiliki ijazah S1. Namun, masih terdapat 2,25% guru PNS dan 3,22% guru non PNS yang belum memiliki ijazah S1.

Tabel 3.9 Jumlah Guru SMP berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Status Kepegawaian		Total
	PNS	Non PNS	
< S1	2	176	178
>= S1	932	4.710	5.642
Total Guru	**934**	**4.886**	**5.820**

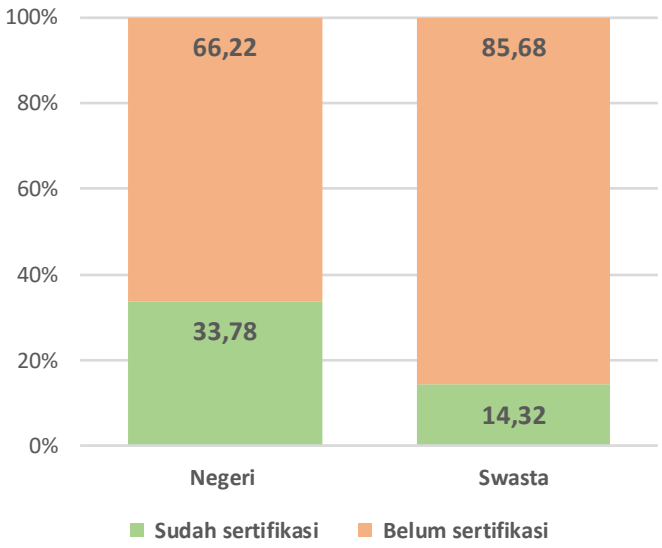


Grafik 3.10 Persentase Guru SMP berdasarkan status kepegawaian dan kualifikasi pendidikan

Pada tingkat SMP, dapat terlihat bahwa jumlah guru PNS juga lebih kecil jumlahnya dibandingkan guru non PNS. Kemudian jika melihat kualifikasi pendidikan, secara keseluruhan hampir seluruh guru sudah memiliki ijazah S1. Namun, masih terdapat 0,21% guru PNS dan 3,60% guru non PNS yang belum memiliki ijazah S1.

Tabel 3.10 Jumlah Guru SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Status Sertifikasi	Status Sekolah		Total
	Negeri	Swasta	
Sudah sertifikasi	2.992	521	3.513
Belum sertifikasi	5.865	3.116	8.981
Total Guru	**8.857**	**3.637**	**12.494**

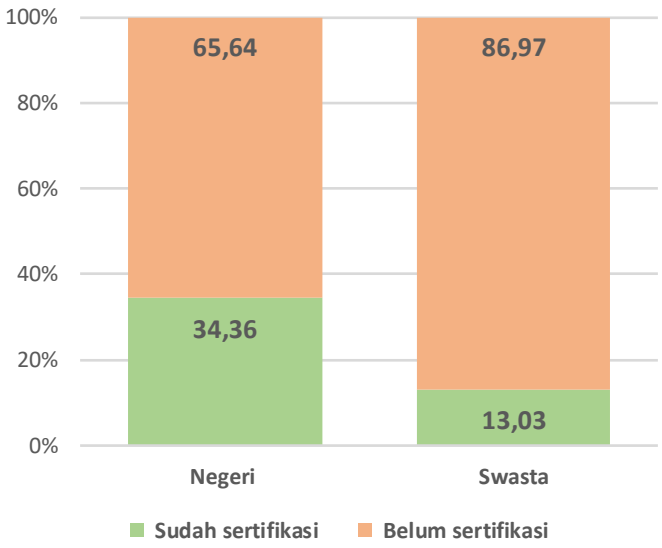


Grafik 3.11 Persentase Guru SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Berdasarkan status sertifikasi, terdapat 3.513 guru yang sudah sertifikasi dari total 12.494 guru SD. Hal ini berarti, masih cukup banyak guru yang belum mendapatkan sertifikasi. Jika dilihat berdasarkan status sekolah, persentase guru SD negeri yang memiliki sertifikasi lebih tinggi dibandingkan guru SD swasta. Di mana terdapat 33,78% guru SD negeri yang sudah sertifikasi, sedangkan pada sekolah swasta hanya terdapat 14,32% guru yang sudah sertifikasi.

Tabel 3.11 Jumlah Guru SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Status Sertifikasi	Status Sekolah		Total
	Negeri	Swasta	
Sudah sertifikasi	1.027	369	1.396
Belum sertifikasi	1.962	2.462	4.424
Total Guru	**2.989**	**2.831**	**5.820**



Grafik 3.12 Persentase Guru SP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

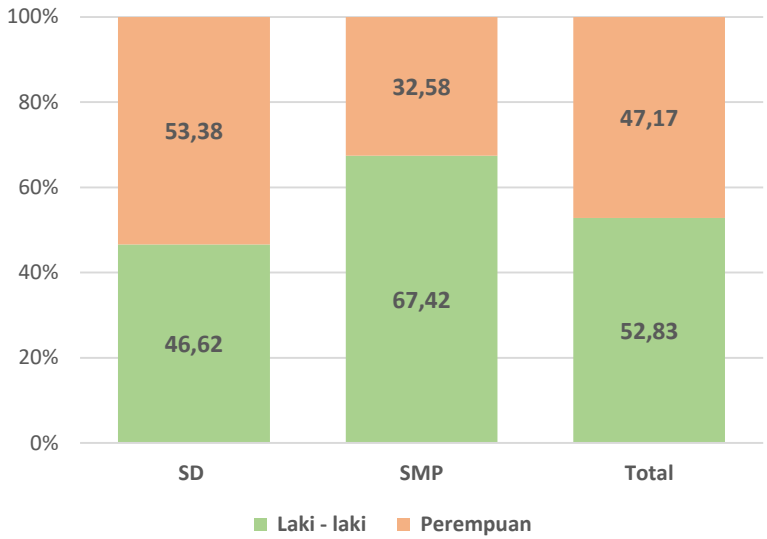
Pada tingkat SMP, terdapat 1.396 guru yang sudah sertifikasi dari total 4.424 guru. Jika dilihat berdasarkan status sekolah, persentase guru SMP negeri yang memiliki sertifikasi lebih tinggi dibandingkan guru SMP swasta. Di mana terdapat 34,36% guru SMP negeri yang sudah sertifikasi, sedangkan pada sekolah swasta hanya terdapat 13,03% guru yang sudah sertifikasi.

c. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan. Berasarkan pada DAPODIK, data Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.12 Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	SD	SMP	Total
Laki - laki	434	267	701
Perempuan	497	129	626
Total Kepala Sekolah	**931**	**396**	**1.327**

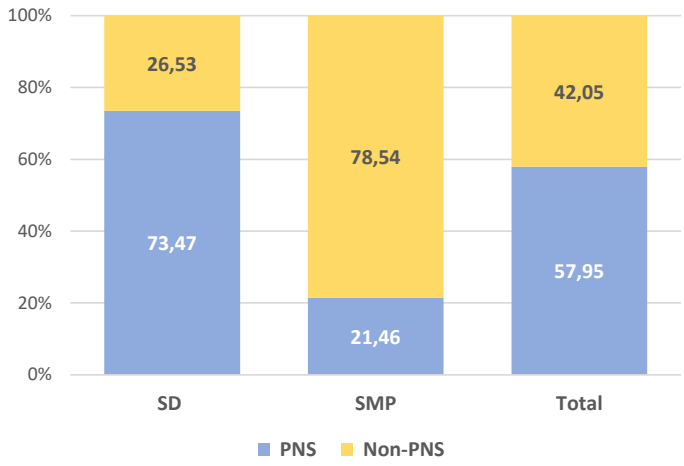


Grafik 3.13 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 3.12 dan Grafik 3.13 dapat diperoleh informasi jumlah Kepala Sekolah (KS) berdasarkan jenis kelamin pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, jumlah KS laki-laki yaitu 434 (46,62%) lebih sedikit dibandingkan dengan KS Perempuan yaitu 497 (53,38%). Sedangkan pada jenjang SMP, jumlah KS laki-laki yaitu 267 (67,42%) lebih banyak dibandingkan dengan KS perempuan yaitu 129 (32,38%). Secara keseluruhan, KS laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan KS perempuan.

Tabel 3.13 Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
PNS	682	2	684	83	2	85
Non-PNS	-	247	247	-	311	311
Total Kepala Sekolah	682	249	931	83	313	396

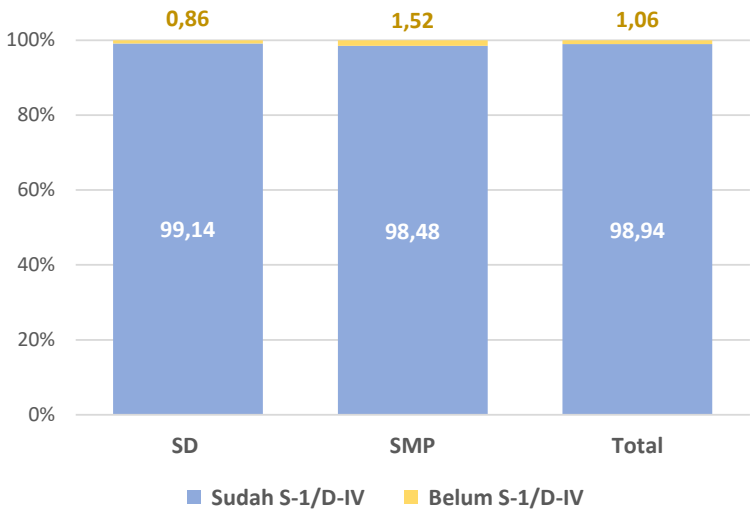


Grafik 3.14 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Tabel 3.13 dan Grafik 3.14 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan status kepegawaian pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, jumlah KS PNS yaitu 684 (73,47%) lebih banyak dibandingkan KS Non-PNS yaitu 247 (26,53%). Sementara pada jenjang SMP, KS PNS yaitu 85 (21,46%) lebih sedikit dibandingkan dengan KS Non-PNS yaitu 311 (78,54%), hal ini tentu bersesuaian dengan komposisi status SMP di Kabupaten Tangerang, dimana kondisinya sekolah negeri lebih sedikit dibandingkan sekolah swasta. Kemudian baik pada jenjang SD dan SMP, seluruh KS pada sekolah negeri sudah berstatus PNS.

Tabel 3.14 Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
Sudah S-1/D-IV	681	242	923	83	307	390
Belum S-1/D-IV	1	7	8	-	6	6
Total Kepala Sekolah	682	249	931	83	313	396

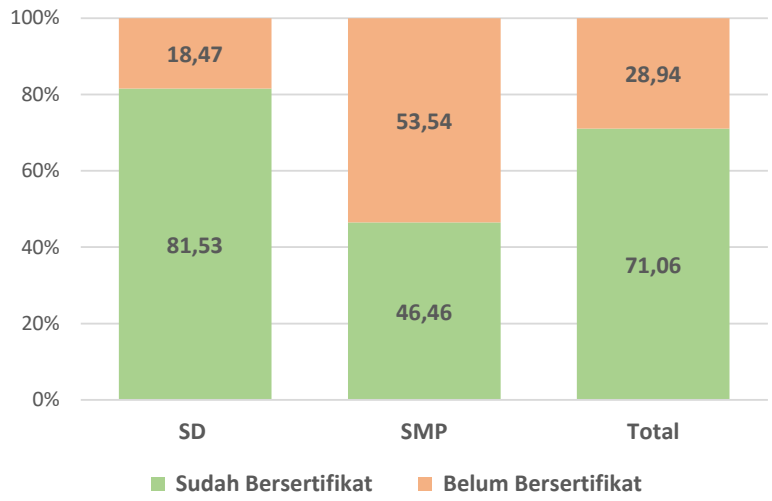


Grafik 3.15 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Tabel 3.14 dan Grafik 3.15 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan kualifikasi pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, 923 (99,14%) KS sudah berkualifikasi minimal S1/D4, artinya masih ada 8 (0,86%) KS SD yang belum S1/D4. Kemudian pada jenjang SMP, 390 (98,48%) KS sudah berkualifikasi minimal S1/D4, artinya masih ada 6 (1,52%) KS SMP yang belum S1/D4. Secara keseluruhan pada jenjang SD dan SMP, KS yang sudah berkualifikasi S1/D4 yaitu sebesar 98,94%.

Tabel 3.15 Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi Pendidik	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
Sudah Bersertifikat	676	83	759	76	108	184
Belum Bersertifikat	6	166	172	7	205	212
Total Kepala Sekolah	**682**	**249**	**931**	**83**	**313**	**396**



Grafik 3.16 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Berdasarkan Tabel 3.15 dan Grafik 3.16 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan sertifikasi pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, dari 931 KS, 759 (81,53%) diantaranya sudah bersertifikat. Sementara pada jenjang SMP, dari 396 KS, 184 (46,46%) diantaranya sudah bersertifikat. Secara umum, 71,06% KS jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang sudah bersertifikat pendidik.

d. Pengawas Sekolah

Tugas Pokok Pengawas yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Tabel 3.16 Pengawas Sekolah jenjang SD dan SMP

Pengawas Sekolah	Jumlah	Gugus	Sekolah
SD	27	91	1.023
SMP	32	10	458
Jumlah	**59**	**101**	**1.481**

Berdasarkan Tabel 3.16, di Kabupaten Tangerang terdapat 59 pengawas. Pada SD terdapat sejumlah 27 pengawas, sementara SMP terdapat sejumlah 32 pengawas. Artinya, pada SD rata-rata satu pengawas mengawasi 38 sekolah, sementara pada SMP rata-rata satu pengawas mengawasi 14 sekolah.

e. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Berdasarkan DAPODIK, berikut data tenaga penunjang kependidikan jenjang SD dan SMP.

Tabel 3.17 Tenaga Penunjang Kependidikan SD

Tenaga Kependidikan	Status Sekolah		Total
	Negeri	Swasta	
Laboran	-	2	2
Penjaga Sekolah	363	26	389
Pesuruh/Office Boy	17	27	44
Petugas Keamanan	14	9	23
Tenaga Administrasi Sekolah	288	241	529
Tenaga Perpustakaan	37	21	58
Total	**719**	**326**	**1.045**

Tabel 3.18 Tenaga Penunjang Kependidikan SMP

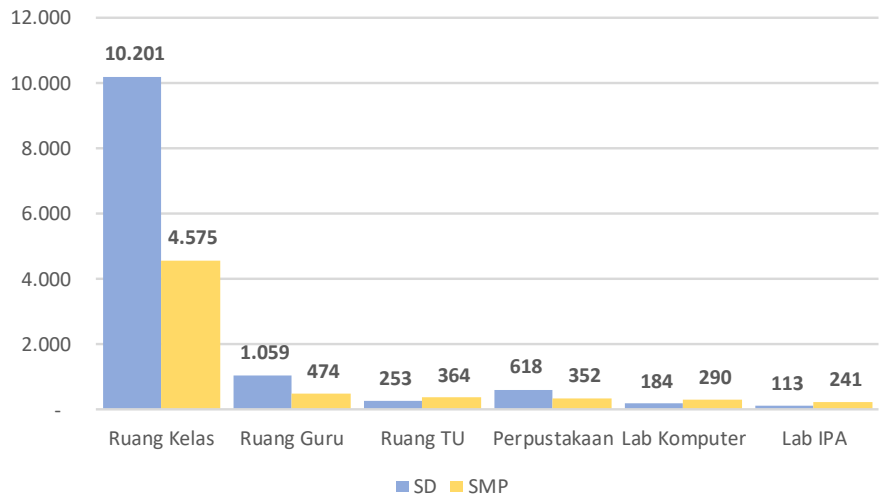
Tenaga Kependidikan	Status Sekolah		Total
	Negeri	Swasta	
Laboran	-	4	4
Penjaga Sekolah	98	17	115
Pesuruh/Office Boy	74	19	93
Petugas Keamanan	43	11	54
Tenaga Administrasi Sekolah	337	267	604
Tenaga Perpustakaan	21	12	33
Total	**573**	**330**	**903**

f. Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat penting bagi terciptanya proses pembelajaran karena merupakan pendukung keamanan dan kenyamanan dalam belajar. Berikut merupakan data komponen sarana prasarana SD dan SMP berdasarkan inputan sekolah pada Dapodik:

Tabel 3.19 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan jenis

Sarana Prasarana	SD		SMP		Total
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Ruang Kelas	7.147	3.054	1.921	2.654	14.776
Ruang Guru	749	310	88	386	1.533
Ruang TU	94	159	83	281	617
Perpustakaan	421	197	80	272	970
Lab Komputer	41	143	52	238	474
Lab IPA	20	93	70	171	354



Grafik 3.17 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan jenis

Berdasarkan Grafik 3.17, dapat terlihat jumlah ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan lebih banyak pada SD daripada SMP, karena jumlah sekolah dan rombongan belajar pada SD memang lebih besar daripada SMP. Sedangkan, jumlah ruang TU, Laboratorium Komputer, dan Laboratorium IPA lebih besar pada tingkat SMP daripada SD. Hal ini mungkin disebabkan, karena kebutuhan laboratorium Komputer dan IPA untuk pembelajaran lebih besar pada tingkat SMP.

Tabel 3.20 Kepemilikan Toilet SD

Kepemilikan Toilet	Memiliki		Tidak Memiliki
	Terpisah	Bersama	
Guru	411	292	320
Siswa	826	131	66

Tabel di atas menjelaskan kepemilikan toilet di tingkat SD. Dapat terlihat bahwa untuk toilet guru, terdapat 411 sekolah yang sudah memiliki toilet terpisah, berarti terdapat minimal satu toilet untuk guru laki-laki dan satu toilet untuk guru perempuan. Kemudian, sebanyak 292 sekolah memiliki toilet guru bersama. Sedangkan, masih terdapat 320 sekolah yang tidak memiliki toilet guru sama sekali. Kemudian untuk toilet siswa, sebagian besar sekolah sudah memiliki toilet siswa namun masih terdapat 66 sekolah yang tidak memiliki toilet siswa. Di antara sekolah yang sudah memiliki toilet siswa, 826 sekolah sudah memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 131 lainnya masih memiliki toilet bersama.

Tabel 3.21 Kepemilikan Toilet SMP

Kepemilikan Toilet	Memiliki		Tidak Memiliki
	Terpisah	Bersama	
Guru	255	91	112
Siswa	379	47	32

Pada tingkat SMP, dapat terlihat untuk toilet guru terdapat 346 sekolah yang telah memiliki toilet dengan rincian 255 sekolah memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 91 lainnya tidak. Kemudian untuk toilet siswa, kebanyakan sekolah sudah memiliki toilet siswa namun masih terdapat 32 sekolah yang tidak memiliki toilet siswa. Di antara sekolah yang sudah memiliki toilet siswa, 379 sekolah sudah memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 47 lainnya masih memiliki toilet bersama.

Tabel 3.22 Ketersediaan Sarana Prasarana SD dan SMP

Ketersediaan Sarpras	SD			SMP		
	Sudah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Persentase	Sudah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Persentase
Ruang Kelas	10.201	1.326	88,50	4.575	- 489	111,97
Ruang Guru	941	82	91,98	435	23	94,98
Ruang TU	247	776	24,14	341	117	74,45
Perpustakaan	594	429	58,06	335	123	73,14
Lab. Komputer	173	850	16,91	268	190	58,52
Lab. IPA	108	915	10,56	213	245	46,51

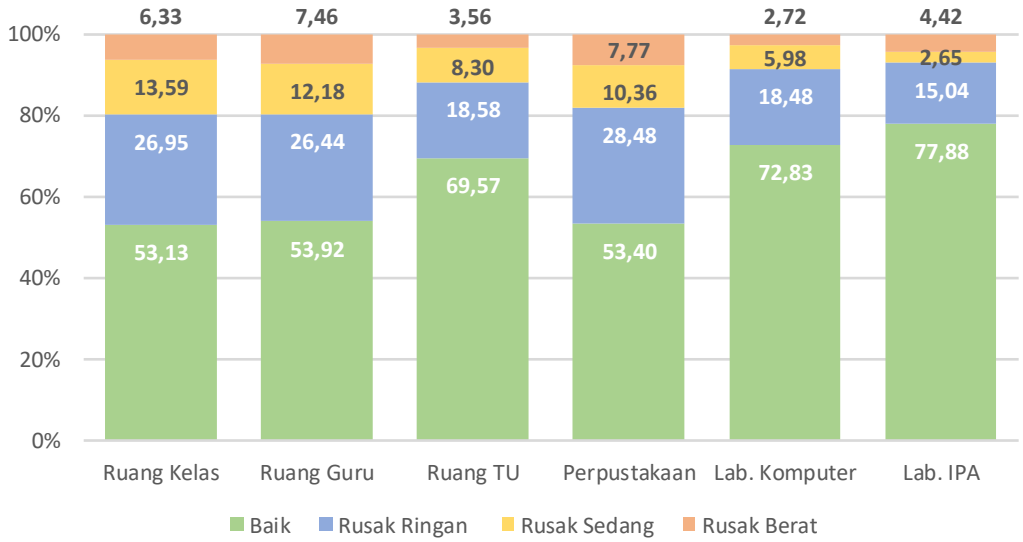
Kebutuhan ruang kelas dapat dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar. Pada tingkat SD, rombongan belajar berjumlah 11.527 dan ruang kelas berjumlah 10.201, yang berarti masih ada kekurangan sebesar 1.326 kelas atau baru 88,50 persen ruang kelas yang terpenuhi. Sedangkan pada tingkat SMP, jumlah ruang kelas lebih banyak daripada rombongan belajar, yaitu tersedia 4.575 ruang kelas untuk 4.086 rombongan belajar.

Kebutuhan ruang guru, ruang TU, perpustakaan, laboratorium komputer, dan laboratorium IPA dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap sekolah minimal memiliki satu ruang guru, ruang TU, perpustakaan, Laboratorium komputer dan Laboratorium IPA, sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

Ketersediaan ruang guru baik pada SD maupun SMP sudah di atas 90% yang artinya sudah cukup banyak sekolah yang memiliki ruang guru, namun untuk ruang TU, hanya 24,14% SD dan 74,45% SMP yang memiliki ruang TU. Kemudian, ketersediaan perpustakan pada tingkat SD masih sebesar 58,06% sedangkan SMP sudah cukup tinggi yaitu 73,14% sekolah yang sudah memiliki perpustakaan. Untuk laboratorium, pada tingkat SD ketersediaannya masih cukup rendah yaitu 16,91% untuk Lab. Komputer dan 10,56% untuk Lab. IPA. Lalu untuk tingkat SMP, ketersediaan Lab. Komputer sudah lebih dari setengah yang memiliki yaitu 58,52% sekolah dan 46,51% sekolah yang memiliki Lab. IPA.

Tabel 3.23 Jumlah Sarana Prasarana SD menurut Kondisi

Sarana Prasarana	Kondisi			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Ruang Kelas	5.420	2.749	1.386	646
Ruang Guru	571	280	129	79
Ruang TU	176	47	21	9
Perpustakaan	330	176	64	48
Laboratorium Komputer	134	34	11	5
Laboratorium IPA	88	17	3	5

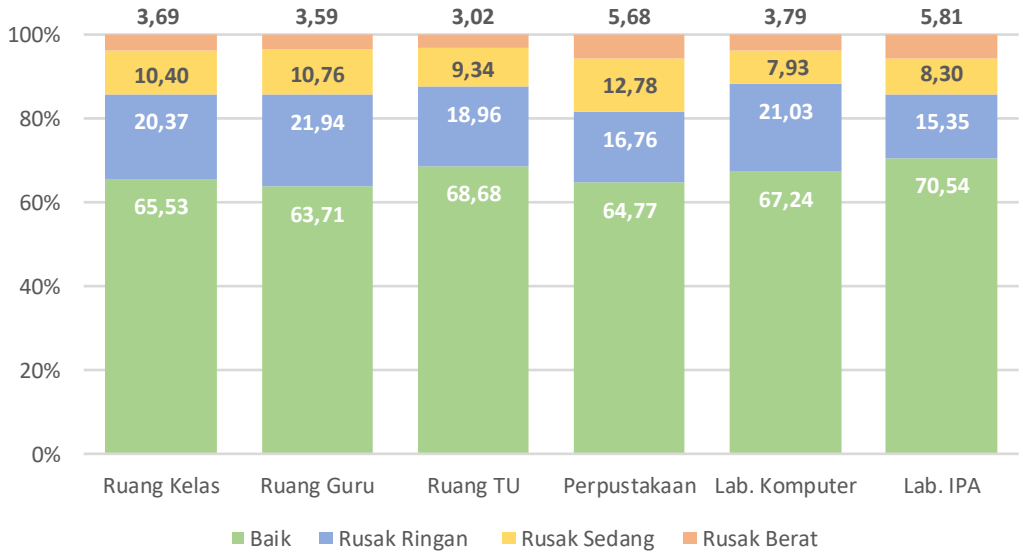


Grafik 3.18 Persentase Sarana Prasarana SD menurut Kondisi

Tabel dan grafik di atas menjelaskan bagaimana kondisi sarana prasarana yang terdapat di tingkat SD. Pada ruang kelas, ruang guru dan perpustakaan hanya 53% ruangan dengan kondisi baik, selebihnya memiliki tingkat kerusakan yang beragam. Kemudian untuk ruang TU terdapat 69,57% ruang dengan kondisi baik. Lalu pada laboratorium, baik IPA maupun komputer ruangan dengan kondisi baik sudah di atas 70%.

Tabel 3.24 Jumlah Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi

Sarana Prasarana	Kondisi			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Ruang Kelas	2.998	932	476	169
Ruang Guru	302	104	51	17
Ruang TU	250	69	34	11
Perpustakaan	228	59	45	20
Laboratorium Komputer	195	61	23	11
Laboratorium IPA	170	37	20	14



Grafik 3.19 Persentase Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi

Secara keseluruhan, kondisi sarana prasarana di tingkat SMP lebih baik dibandingkan SD. Pada semua kategori, ruangan dengan kondisi baik sudah di atas 60%, meskipun juga masih ada kondisi rusak sedang dan rusak berat pada semua kategori.

C. Data Pokok Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

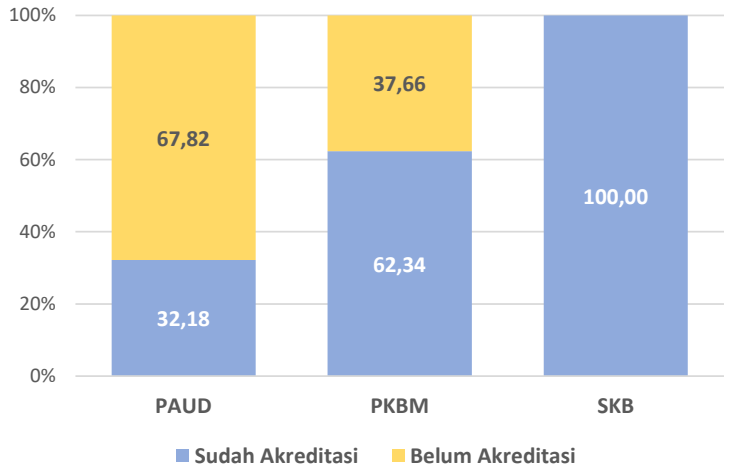
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM menyelenggarakan program pendidikan yaitu Paket A setingkat jenjang SD, Paket B setingkat jenjang SMP dan Paket C setingkat jenjang SMA.

Satuan PNF sejenis atau yang lebih dikenal dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berbentuk Satuan Pendikan Nonformal Sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

1. Data Lembaga Pendidikan Nonformal

Tabel 3.25 Lembaga Pendidikan Nonformal

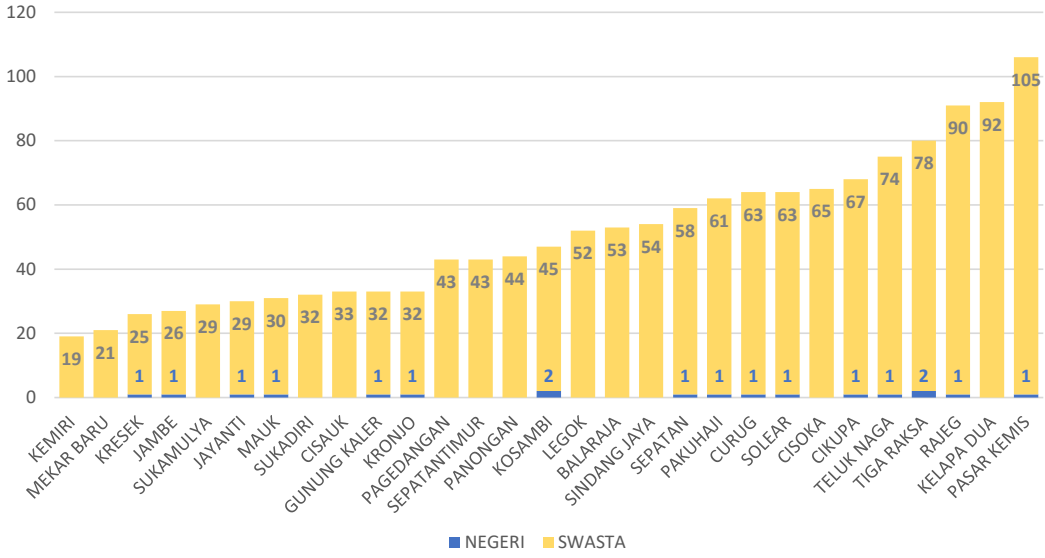
Lembaga	Status Sekolah	Status Akreditasi		Total
		Sudah Akreditasi	Belum Akreditasi	
PAUD	Negeri	10	8	18
	Swasta	465	993	1.458
PKBM	Swasta	48	29	77
SKB	Negeri	1	-	1
Total		**524**	**1.030**	**1.554**



Grafik 3.20 Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal

Berdasarkan Tabel 3.25 dan Grafik 3.20 dapat diketahui bahwa jumlah PAUD di Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 1.476 dengan status 18 PAUD negeri dan 1.458 PAUD swasta. Dari 1.476 PAUD, 475 (32,18%) diantaranya sudah terakreditasi. Kemudian terdapat 77 PKBM, dengan 48 (62,34%) diantaranya sudah terakreditasi, serta terdapat satu SKB dan sudah terakreditasi. Berikut Sebaran Data Lembaga Pendidikan Nonformal di tiap kecamatan Kabupaten Tangerang:

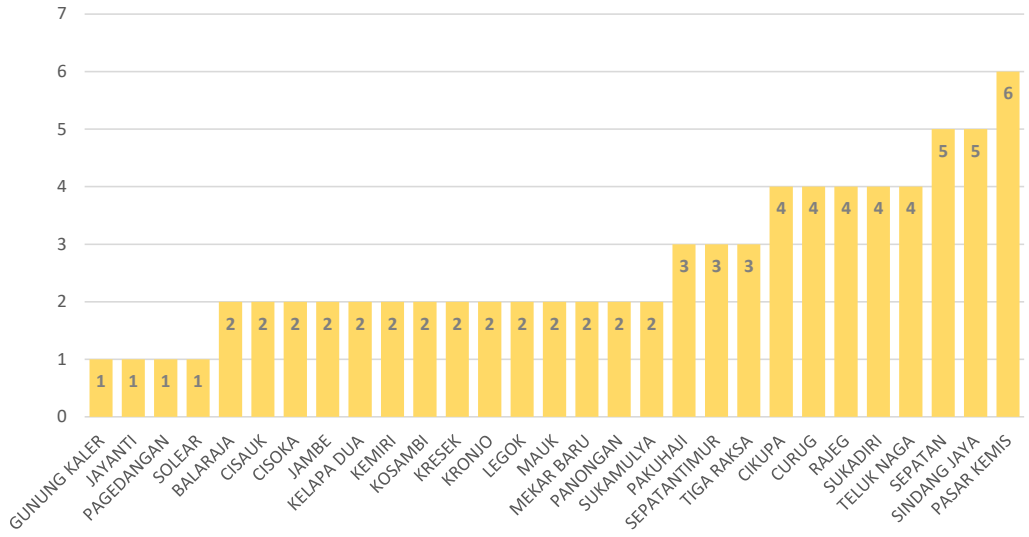
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



Grafik 3.21 Sebaran Data PAUD

Sejumlah 1.476 PAUD tersebar di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Lembaga PAUD paling sedikit berada di Kecamatan Kemiri yaitu 19 lembaga dan terbanyak berada di Kecamatan Pasarkemis yaitu sejumlah 106 lembaga. Berdasarkan status lembaga, terdapat 18 satuan pendidikan negeri yang tersebar pada 16 kecamatan (dapat dilihat pada Grafik 3.21)

b. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)



Grafik 3.22 Sebaran Data PKBM

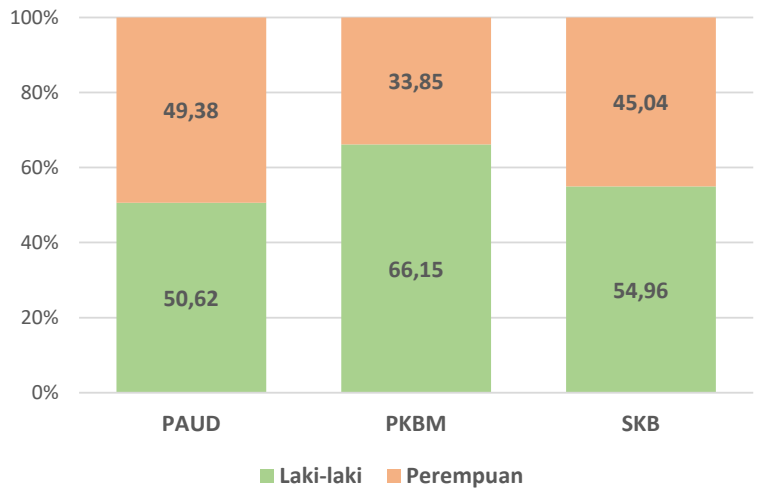
Sejumlah 77 PKBM tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Tangerang. Lembaga PKBM terbanyak berada di Kecamatan Pasarkemis yaitu sejumlah 6 lembaga, kemudian pada Kecamatan Sepatan dan Sindang Jaya ada 5 lembaga PKBM. Sementara pada kecamatan lainnya, terdapat minimal satu lembaga PKBM.

2. Data Peserta Didik/ Warga Belajar

Peserta Didik pada lembaga Pendidikan Nonformal bervariasi, mulai dari kelompok usia 0 sampai 6 Tahun untuk peserta didik PAUD, usia 7 sampai dengan 18 tahun untuk peserta didik SKB, dan usia 7 sampai dengan tidak terbatas bagi peserta didik PKBM.

Tabel 3.26 Data Peserta Didik/ Warga Belajar

Lembaga	Jumlah Peserta Didik/Warga Belajar		Total
	Laki-laki	Perempuan	
PAUD	27.938	27.253	55.191
PKBM	7.115	3.641	10.756
SKB	72	59	131
Total	**35.125**	**30.953**	**66.078**



Grafik 3.23 Persentase Peserta Didik/ Wajib Belajar

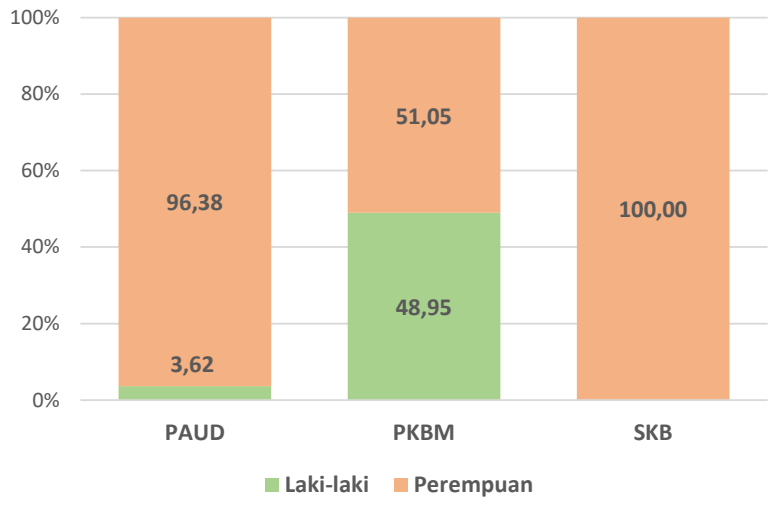
Jumlah peserta didik/warga belajar PAUD di Kabupaten Tangerang yaitu 55.191 orang, dengan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang hampir sama, yaitu laki-laki 27.938 (50,62%) dan perempuan 27.253 (49,38%). Kemudian pada PKBM, jumlah warga belajarnya yaitu 10.756 orang, dengan jumlah laki-laki 7.115 (66,15%) dan perempuan 3.641 (33,85%). Sementara pada SKB, terdapat 131 warga belajar dengan 72 (54,96%) diantaranya laki-laki dan 59 (45,04%) orang perempuan.

3. Data Pendidik Nonformal

Pendidik pada Lembaga Pendidikan Nonformal dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda; Guru bagi lembaga PAUD, Tutor bagi lembaga PKBM, dan Pamong bagi SKB.

Tabel 3.27 Pendidik Pendidikan Nonformal

Lembaga	Jumlah Pendidik/Guru/Tutor/Pamong		Total
	Laki-laki	Perempuan	
PAUD	137	3.643	3.780
PKBM	210	219	429
SKB	-	2	2
Total	**347**	**3.864**	**4.211**



Gambar 3.24 Persentase Pendidik Pendidikan Nonformal

Pendidik pada pendidikan nonformal berjumlah 4.211 orang dengan 347 diantaranya laki-laki dan mayoritasnya adalah perempuan, yaitu sejumlah 3.864 orang. Pada PAUD, terdapat 3.780 pendidik dengan 137 (3,62%) pendidik laki-laki dan selebihnya yaitu 3.643 (96,38%) pendidik perempuan. Selanjutnya pada PKBM, terdapat 429 pendidik dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang hampir sama yaitu 210 (48,95%) pendidik laki-laki dan 219 (51,05%) pendidik perempuan. Sementara pada satu SKB, terdapat dua pendidik yang keduanya adalah perempuan.

D. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dapat digambarkan dari peningkatan mutu sekolah/ Lembaga, mutu siswa, mutu guru dan mutu sarana prasarana.

1. Peningkatan Mutu Sekolah/ Lembaga

Program peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah antara lain:

a. Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM);
b. Pemberdayaan Gugus Sekolah Dasar;
c. Pendampingan Data Pokok Pendidikan;
d. Pendampingan Sekolah Sasaran Akreditasi;
e. Jambore Sanitasi Sekolah; dan
f. Pedampingan Sekolah Model.

2. Peningkatan Mutu Siswa

Program peningkatan mutu siswa antara lain:

a. Fasilitasi kegiatan Olimpiade Sains Nasional (O2SN);
b. Penyelenggaraan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa;
c. Pemberdayaan dan Penilaian Budaya Mutu Sekolah berupa Lomba Bidang Pembelajaran, Perpustakaan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Lomba Olahraga;
d. Sosialisasi Penanaman Pendidikan Anti Korupsi;
e. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
f. Sosialisasi Narkoba bagi siswa;

g. Pelatihan Kompetensi Bidang Studi Ekstrakurikuler;
h. Pelatihan kompetensi Siswa berprestasi;
i. Pendampingan sekolah model dan rujukan;
j. Pelatihan kompetensi Siswa berprestasi;
k. Peningkatan Prestasi Ekstrakulikuler;
l. Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Berprestasi dan MBR; dan
m. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3. Peningkatan Mutu Guru

Program peningkatan mutu guru antara lain:

a. Pengembangan Kurikulum;
b. Bedah Standar Kelulusan Sekolah (SKL);
c. Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS);
d. Sosialisasi kurikulum SMP dan pengembangan kompetensi pembelajaran dikelas;
e. Pelatihan penyusunan kurikulum 2013;
f. Pedampingan Implementasi Kurikulum 2013;
g. Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
h. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi;
i. Peningkatan Kompetensi Dan Sertifikasi Calon Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
j. Sosialisasi perundang-undangan bagi Guru Pendidikan dasar;
k. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Profesi Guru; dan
l. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan.

4. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana

Program peningkatan mutu sarana prasarana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan berupa:

a. Rehabilitasi ruang kelas;
b. Penambahan ruang kelas baru;
c. Penyediaan mebeulair;
d. Penyediaan alat praktik/ peraga/Media Pembelajaran;
e. Penyediaan Perpustakaan dan Perabotnya;
f. Penyediaan Laboratorium IPA; dan
g. Penyediaan Laboratorium Komputer.

Peningkatan mutu sarana prasarana tersebut bersumber dari Pemerintah pusat, Provinsi, APBD Murni Kabupaten Tangerang dan *stakeholder* lain dalam bentuk program Bantuan Pemerintah, Bantuan Provinsi, Bantuan Sosial, DAK dan/ atau CSR.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Jl. H. Abdul Hamid No. 20, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, Banten 15720

2023